

## BAB II PERMASALAHAN TERORISME

### A. TERORISME

#### 1. Sejarah Terorisme

Fenomena terorisme adalah fenomena yang telah terjadi sejak lama, bahkan telah terjadi sepanjang sejarah umat manusia sebelum kata “teror” itu sendiri masuk ke dalam kosakata politik internasional. Teror adalah fenomena yang sudah lama ada dan terjadi sepanjang sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan.<sup>1</sup> Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dengan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme moderen.<sup>2</sup>

Kata “assassin” mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi yang menginspirasi terorisme internasional di era globalisasi ini.<sup>3</sup> Terorisme muncul di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 (menjelang Perang Dunia I) dan menjelang Perang Dunia II, dimana terorisme menjadi teknik perjuangan revolusi dan terjadi hampir di seluruh benua. Kata “teror” itu sendiri masuk ke dalam kosakata politik baru pada Revolusi Prancis sebagai “*Reign Of Terror*” (Pemerintahan Teror) pada

<sup>1</sup> Hardiman, Dr. F. Budi, *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hal. 3

<sup>2</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Paulus, Kol.Inf. Loudewijk F., *Kopassus, Terorisme*)

<sup>3</sup> Hardiman, Dr. F. Budi, *Terorisme: ...*, hal. 3

tahun 1793-1794. Pada saat itu revolusioner di Perancis, Robespierre mengeksekusi 12.000 orang yang dianggap sebagai musuh revolusi. Pada akhirnya, semangat revolusi Perancis menyebar ke Rusia, Eropa dan Amerika Serikat di awal abad ke-20.<sup>4</sup>

Penganut paham anarki radikal, Leon Czolgosz membunuh William McKinly tahun 1901, Alexander Berkman menembak mati tokoh terkemuka baja Henry Frick tahun 1892, rakyat Rusia yang membunuh Tsar Alexander II tahun 1881 (target pemimpin kuat yang menimbulkan revolusi terkenal), serta pemboman Haymarket Chicago tahun 1886 dimana pembunuhan ini untuk menimbulkan kepanikan dan publisitas. Meskipun demikian, penganut paham revolusi anarki belum begitu muncul.

Sejarah mencatat pada tahun 1890-an, aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade Perang Dunia I, aksi terorisme diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi.<sup>5</sup> Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal damai karena berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik antara Timur dan Barat, dan membawa serta beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik baru yaitu konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak negara berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme.

Pada pertengahan abad ke-20, penduduk pribumi dari Mesir hingga Vietnam melakukan pemberontakan melawan rejim kolonial. Mereka menggunakan aksi

<sup>4</sup> [www.hnn.us/articles/289.html](http://www.hnn.us/articles/289.html) (Greenberg, David, *Is Terrorism New?*)

<sup>5</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Paulus, Kol. Inf. Loudewijk F., Kopassus, "Terorisme")

penghancuran dramatis (oleh beberapa kalangan disebut terorisme) untuk mendapatkan perhatian. Namun yang didefinisikan sebagai terorisme moderen adalah aksi yang dilakukan oleh *Algeria's Front de Liberation Nationale* (FLN) dalam usahanya membebaskan diri dari Perancis dengan cara membunuh warga sipil Perancis secara acak.<sup>6</sup> Setelah Perancis mengeksekusi dua pemberontak Algeria pada tahun 1956, FLN membalas dengan membantai 49 orang Perancis dalam 3 hari. Teroris FLN membom kafe pinggir pantai tempat keluarga Perancis berkumpul dan terbunuh. Mereka ingin membayar kolonialisme pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi, dan mereka melakukannya.

Kesuksesan FLN menginspirasi gerakan lainnya, seperti gerakan separatis Basque dan Quebec, nasionalis Palestina dan Irlandia, persekutuan Marxis di Afrika dan Amerika Selatan. Pada tahun 1960-an, pembunuhan warga sipil untuk memberikan ketakutan dan mengamankan kepentingan politis menyebar, bahkan di negara-negara maju mulai dari gerakan bawah tanah *Weather* (*The Weather Underground*) di Amerika hingga gerombolan Marxis *Baader-Meinhoff* (*The Marxist Baader-Meinhoff Gang*) di Jerman Barat dan Brigade Merah (*The Red Brigades*) di Italia.

Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan mengalami peningkatan pada awal dasawarsa tahun 1970-an. Istilah "terorisme" sendiri pada 1970-an dikenakan pada beragam fenomena: dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan dilakukan juga oleh

---

<sup>6</sup> [www.hnn.us/articles/289.html](http://www.hnn.us/articles/289.html) (Greenberg, David, *Is Terrorism New?*)

pemerintah sebagai sarana dan cara menegakkan kekuasaan.<sup>7</sup> Beberapa pemerintah bahkan menstigma musuh-musuhnya sebagai “teroris” dan aksi-aksi mereka disebut “terorisme”. Terorisme adalah fenomena dalam masyarakat demokratis dan liberal atau masyarakat yang menuju transisi ke sana. Kaum teroris memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat itu.<sup>8</sup>

Dalam insiden 11 September 2001, teror telah mencapai dimensi terbarunya, bukan “sekedar” ingin menunjukkan sikap perlawanan atau menekan terhadap sebuah rejim, melainkan juga ingin memobilisasi sebuah konflik global dengan mengisi “kevakuman ideologis” yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin. Skala gigantis dari teror ini ‘sukses’ memobilisasi opini politis global untuk mengarahkan kepada pembentukan antinomi “kawan” dan “lawan” pada skala global (C. Schmitt).<sup>9</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dingin, intensitas kegiatan terorisme internasional tidak memperlihatkan gejala penurunan tetapi justru mengalami peningkatan. Tidak terkecuali bagi Australia, ancaman dan serangan terorisme telah berdampak langsung terhadap kepentingan Australia. Fenomena terorisme telah mendorong Australia untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal waktu dan tempat.

## 2. Definisi Terorisme

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu seperti sosiologi, kriminologi, politik, psikologi, hubungan internasional dan hukum, sehingga sulit untuk merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Masalah lain dalam mendefinisikan terorisme adalah perubahan dari terorisme tersebut yang pada saat tertentu dilakukan oleh negara, pada

<sup>7</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Pamls, Kol. Inf. Loudewijk F., Kopassus, “Terorisme”)

<sup>8</sup> Hardiman, Dr. F. Budi, *Terorisme:...*, hal. 3

<sup>9</sup> *Ibid...*, hal. 3



waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non-negara atau bahkan oleh keduanya.

Walter Lacquer dalam bukunya *The Age of Terrorism* (1987) menyatakan bahwa “Tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa mencakup ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah”. Kemudian mengutip sebuah ungkapan yang terkenal dari Justice Potter Stewart, “*I can't define it [terrorism] but I know when I see it*”.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, definisi terorisme harus dibuat demi mencegah dan mengantisipasi tindakan yang mungkin dilakukan dan telah dilakukan oleh para teroris baik organisasi maupun negara. Definisi terorisme menurut:<sup>11</sup>

- Konvensi PBB tahun 1937, “Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas”.
- *US Department of Defence* tahun 1990, “Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi”.
- Tentara Nasional Indonesia / Angkatan Darat dalam Bujuknik tentang Anti-Teror tahun 2000, “Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan”.

<sup>10</sup> Vermonte, Phillips J., *Menyoal Globalisasi dan Terorisme*, Imparsial, Jakarta, 2003

<sup>11</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Paulus, Kol.Inf. Loudewijk F., Kopassus, “Terorisme”)

- Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional (1999), “Terorisme merupakan salah satu realitas sosial politik yang telah berlangsung sejak lama. Secara sederhana, terorisme bisa didefinisikan sebagai kegiatan negara atau non negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik. Terorisme dilakukan dengan aksi-aksi kekerasan yang secara psikologis dapat menimbulkan rasa takut pada pihak lain dengan motif politik atau tujuan tertentu”.
- Terorisme menurut Australia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana 1995 (*The Criminal Code Act 1995*) menyebutkan bahwa “Tindakan teroris berarti suatu ancaman atau tindakan dimana tindakan tersebut menyebabkan gangguan atau kejahatan tertentu, dan tindakan tersebut dilaksanakan atau ancaman dibuat dengan niat menyebabkan suatu masalah yang bersifat politis, ideologis atau religius.”

### 3. Ciri-Ciri Dan Karakteristik Terorisme

#### a. Ciri-Ciri Terorisme

Berdasarkan matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri-ciri terorisme adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin, dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan bertahun-tahun.
- Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.

<sup>12</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Paulus, Kol. Inf. Loudewijk F., Kopassus, “Terorisme”)

- Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku seperti agama, hukum, dan sebagainya.
- Memilih sasaran yang menimbulkan efek / akibat psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

#### b. Karakteristik Terorisme

Terorisme termasuk dalam kekerasan politis (*political violence*), seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian, dan sebagainya. Namun terorisme tidak selalu politis, seperti penyanderaan, pembajakan, pengeboman, dan sebagainya. Menurut Paul Wilkinson, aksi terorisme memiliki karakteristik sebagai berikut.<sup>13</sup>

- Merupakan intimidasi yang memaksa.
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- Pesan aksi cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras.

#### 4. Taktik Dan Pengaruh terorisme

##### a. Taktik Terorisme<sup>14</sup>

Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang dilatih dan diorganisir secara khusus. Tindakan pengamanan yang ketat biasanya diberlakukan setelah sasaran operasi dipilih. Anggota tim biasanya tidak dipertemukan sebelum

<sup>13</sup> Wilkinson, Paul, *Terrorism and The Liberate State*, The Machmillan Press Ttd., London, 1977, hal.49

<sup>14</sup> www.buletinlitbang.dephan.go.id (Paulus, Kol.Inf. Loudewijk F., Kopassus, "Terorisme")

pelaksanaan latihan pendahuluan sesaat sebelum berangkat menuju sasaran. Pengintaian biasanya dilaksanakan oleh elemen atau personel khusus yang bertugas sebagai intelijen khusus. Untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan operasi lebih banyak serangan yang direncanakan dari pada yang dilancarkan. Teroris senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah dari sasaran. Mereka seringkali menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi teroris adalah kekerasan, kecepatan dan pendadakan.

Metode yang dilakukan kelompok teroris, biasanya beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari personel yang terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak, amunisi dan radio transistor. Sebelum pelaksanaan operasi, teroris biasanya berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan. Dan setelah pelaksanaan operasi, mereka kembali bergabung dengan masyarakat untuk memperbesar kemungkinan lolos. Jenis taktik yang sering digunakan oleh kelompok teroris adalah bom. Dalam dekade terakhir ini mencatat sekitar 67% dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan dengan bom.

#### **b. Pengaruh Terorisme<sup>15</sup>**

Terorisme juga berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan, yaitu pengaruh pada pertahanan dan keamanan. Sebuah kenyataan bahwa pengaruh aksi terorisme melampaui batas wilayah domestik suatu negara karena memang terorisme tidak mengenal batas wilayah baik aksinya maupun dampak yang ditimbulkannya.

---

<sup>15</sup> [www.buletinlitbang.dephan.go.id](http://www.buletinlitbang.dephan.go.id) (Paulus, Kol. Inf. Loudewijk F., Kopassus, "Terorisme")

## B. PERMASALAHAN TERORISME AUSTRALIA

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori aktor rasional dan kerangka berpikir yang diperlukan untuk mempermudah analisa penelitian dan berkaitan dengan pokok permasalahan ancaman serangan dan serangan terorisme terhadap Australia dan tema yang ada. Sebelum masuk pada permasalahan terorisme Australia, kita pahami dulu teori aktor rasional, konsep kepentingan nasional dan konsep politik luar negeri.

### **Teori Aktor Rasional**

Menurut Stanley Hoffman, aktor paling bermakna dalam politik internasional adalah perilaku negara bangsa.<sup>16</sup> Secara realistik dapat dikatakan bahwa kekuasaan politik terutama sekali masih berada pada lembaga-lembaga pembuat keputusan dalam berbagai negara bangsa. Dan bila politik domestik memang mempengaruhi politik dunia, pengaruh itu pasti secara tidak langsung. Politik domestik tentu lebih dulu mempengaruhi para pembuat keputusan politik luar negeri dan kemudian perilaku eksternal pemerintah itu mempengaruhi politik dunia. Begitu pula sebaliknya, bila lingkungan dunia berpengaruh terhadap politik domestik suatu masyarakat, prosesnya pasti berlangsung melalui pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku para pembuat keputusannya.

Jadi, negara bangsa sebagai aktor rasional yang senantiasa melakukan politik luar negeri, juga memiliki peranan untuk melakukan apa yang disebut sebagai strategi. Yang dimaksud negara bangsa di dalam skripsi ini adalah Australia sebagai aktor rasional yang melakukan politik luar negeri dan strategi. Sementara Australia dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah itu. Dalam

---

<sup>16</sup> Mas'ood, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989, hal. 85

praktek tindakan itu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atas nama kelompok secara keseluruhan, tetapi kelompok itu kemudian terikat pada tindakan itu.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Sebelum masuk pada konsep politik luar negeri, kita pahami dulu konsep kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.<sup>17</sup>

Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya terdapat 5 kategori yang disebut oleh Jack C. Plano dan Roy Olton<sup>18</sup>, termasuk kepentingan nasional Australia sebagai sebuah negara bangsa sebagai berikut :

- (1) *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri
- (2) *Indenpendence* yaitu mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada negara lain secara fisik maupun ekonomi
- (3) *Militer Security* yaitu keamanan militer yang tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain
- (4) *Territorial Integrity* yaitu keutuhan wilayah nasional
- (5) *Economic Well-being* yaitu adanya kesejahteraan ekonomi

<sup>17</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus...*, hal 7

<sup>18</sup> Jack C.Plano dan Roy Olton "The International Relations Dictionary" Halt Rinehart Winston INC Western Michigan University, 1923, hal. 127

## Konsep Politik Luar Negeri

Dalam membina hubungannya dengan negara lain, suatu negara perlu melakukan tindakan politik luar negeri yang mencakup kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara terhadap negara lainnya.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

*"...strategy planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest."*

Dari definisi di atas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>19</sup>

Setiap politik luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaukannya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah (*revisionist policy*) atau mempertahankan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.<sup>20</sup>

Pada dasarnya politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Jadi, politik luar negeri senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi

<sup>19</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus...*, hal.5

<sup>20</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *Kamus...*, hal. 6



kebutuhan utama suatu negara. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional serta tujuan nasional negara tersebut.

Di dalam studi politik luar negeri, terdapat sebuah model yang disebut dengan "*rasionalitas strategis*". Politik luar negeri dipandang sebagai akibat Tindakan Aktor Rasional, dari suatu pemerintahan, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan (kepentingan nasional). Tindakan rasional adalah sebuah tindakan yang diambil setelah kita memperhitungkan untung dan ruginya dari berbagai alternatif yang tersedia.

Hal ini memiliki asumsi bahwa perilaku Australia sebagai pembuat keputusan politik luar negeri adalah rasional, yaitu bahwa pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas.<sup>21</sup> Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal yang emosional. Perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan, dan bukanlah tindakan untung-untungan.

Menurut John Lovell, "Strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan."<sup>22</sup>

Dalam melakukan analisis strategi, aktor harus mengetahui situasi dan menentukan apa sasaran yang hendak dituju. Kemudian ia merumuskan suatu strategi untuk mencapai tujuannya itu. Pemikiran yang harus ada ketika hendak membuat analisis strategi politik luar negeri adalah:

<sup>21</sup> Jack C. Plano & Roy Olton, *Kamus ...*, hal. 90

<sup>22</sup> Lovell, John P., *Foreign Policy in Perspective*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970), hal. 65

1. Perilaku politik luar negeri suatu negara bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan internasional. Setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan itu.
2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara bangsanya. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, masing-masing dinilai berdasarkan analisis biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah yang memenuhi kriteria efisiensi.
3. Dalam dunia yang saling tergantung, ini berarti bahwa para pembuat keputusan itu harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara-negara lain.<sup>23</sup>

Dalam memutuskan strategi apa yang hendak digunakan, negara menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan tujuan nasionalnya, memperhitungkan alternatif-alternatif yang tersedia serta untung-ruginya untuk kemudian memilih alternatif yang ada dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal (sebagai pilihan yang rasional). Hasil yang optimal akan diperoleh bila untung lebih besar daripada rugi ( $U > R$ ).

Penerapan aktor rasional di dalam skripsi ini adalah Australia sebagai aktor rasional yang melakukan politik luar negeri dan strategi. Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional terutama suatu pemerintah yang monolit yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Di sini juga digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pemilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil" dimana para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh

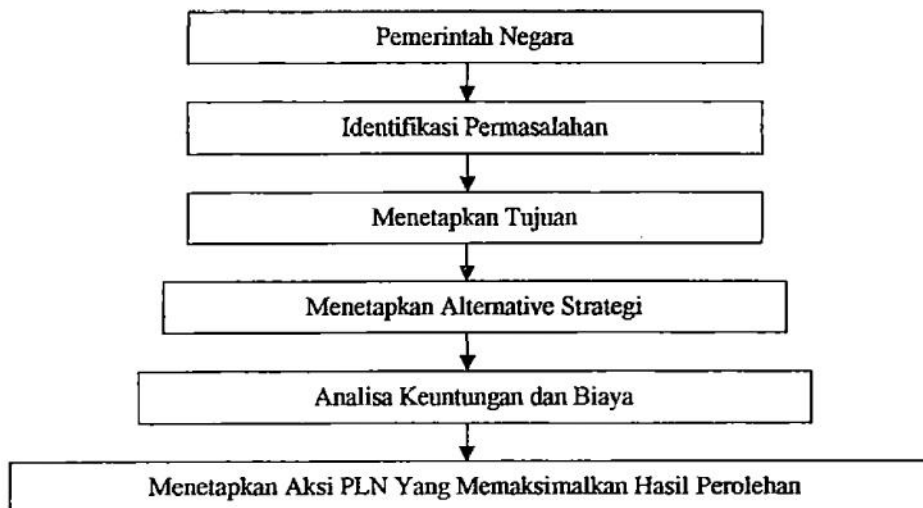
---

<sup>23</sup> Mas'ood, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis...*, hal. 91

informasi yang cukup banyak sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dalam setiap sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>24</sup> Berikut adalah gambaran sederhana dari proses pengambilan keputusan luar negeri menurut Graham T. Allison.

Tabel 2.1

*Proses pembuatan kebijakan politik luar negeri menurut Graham T. Allison*



## **I. Serangan Dan Ancaman Serangan Terorisme Terhadap Kepentingan Australia**

Situasi internasional yang dihadapi oleh Australia sekarang ini adalah fenomena ancaman serangan dan serangan terorisme yang terjadi baik di luar maupun di dalam Australia. Hal ini dapat diamati dari serangan terorisme di Indonesia yang berdampak langsung pada kepentingan nasional Australia, yaitu jatuhnya korban jiwa dari warga negara Australia, diantaranya 88 orang warga negara Australia tewas pada peristiwa Bom Bali I di Bali, Indonesia tahun 2002, Bom Kuningan tahun 2004 di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, 4 orang warga negara Australia tewas

<sup>24</sup> Mohtar Mas' oed "Ilmu Hubungan Internasional: disiplin dan metodologi" Jakarta, cetakan pertama, penerbit PT. Pustaka LP3ES anggota IKAPI, 1990. hal. 234-235

pada Bom Bali II di Bali, Indonesia tahun 2005, dan 3 orang warga negara Australia tewas pada Bom JW Marriot-Ritz Carlton di Jakarta, Indonesia tahun 2009.

Sejak tahun 2001, lebih dari 100 warga Australia tewas dalam serangan teroris diluar negeri. Banyak ancaman serangan lainnya telah digagalkan di Australia. Tiga puluh delapan orang telah dituntut atau sedang dituntut sebagai hasil operasi kontra-terorisme, 35 di antaranya dituntut untuk pelanggaran terorisme sesuai dengan *Criminal Code act 1995 (the Criminal Code)*. Dua puluh orang telah dihukum atas tindak pidana terorisme di bawah *the Criminal Code*. Lebih dari 40 warga Australia paspor mereka telah dicabut atau aplikasi ditolak karena alasan yang berkaitan dengan terorisme.<sup>25</sup>

#### **a. Kasus Peledakan Bom Bali I, 12 Oktober 2002**

Pada 12 Oktober 2002, kembali terjadi ledakan bom yang mengejutkan semua orang. Sekitar pukul 23.30 bom meledak didepan Sari Club, Kuta, Bali dan menewaskan sejumlah orang. Banyak diantara korban tewas adalah orang asing yang sedang berkunjung ke Bali.

Tragedi 12 Oktober 2002 atau peristiwa Bom Bali, merupakan titik awal bagi Australia dalam memerangi ancaman terorisme. Selain mengguncang Indonesia, peristiwa tersebut juga telah menyebabkan guncangan hebat bagi Australia, karena pada saat peristiwa terjadi terdapat banyak warga Australia, termasuk kalangan remaja dan warga negara lainnya tengah menikmati kegembiraan mereka dipulau Bali namun secara tiba-tiba tempat tersebut berubah menjadi tempat yang sangat mencekam dan membuat semua pihak terguncang. Menurut laporan terdapat sekitar 600 warga Australia yang berada di Bali saat peristiwa Bom Bali itu terjadi, dan sebagian besar korban yang jatuh pada peristiwa Bom Bali adalah warga Australia.

---

<sup>25</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia|Protecting Our Community, the Department of the Prime Minister and Cabinet, hal. 7

Dampak yang ditimbulkan para teroris internasional kini tidak hanya mengancam dan mengincar kepentingan AS, namun juga kepentingan sekutunya termasuk Australia.

Penelitian tim investigasi gabungan Polri dan kepolisian mancanegara menyimpulkan, pada 12 Oktober 2002 terjadi tiga kali ledakan bom di Pulau Dewata. Pertama, bom jenis TNT satu kilogram meledak di bagian bangunan Paddy's Bar di Jalan Raya Legian Kuta dan kedua tidak jauh dari tempat itu, yakni didepan Kafe Sari Club dengan bom jenis RDX berbobot 50-100 kilogram. Ledakan yang ketiga terjadi di daerah Renon, dekat kantor Konsulat Amerika Serikat namun tidak ada korban jiwa. Ledakan terakhir ini diketahui menggunakan bom jenis TNT berbobot sekitar 0,5 kilogram. Ledakan bom di Legian, Kuta, menelan 202 korban tewas dan 328 yang lain mengalami luka-luka gores, bakar dan menganga yang cukup serius.<sup>26</sup>

Korban yang jatuh sebagian besar adalah warga negara Australia, secara rinci warga negara korban bom Bali adalah Australia 88 orang, Indonesia 38 orang, Inggris 26 orang, Amerika Serikat 7 orang, Jerman 6 orang, Swedia 5 orang, Belanda 4 orang, Perancis 4 orang, Denmark 3 orang, Selandia Baru 3 orang, Swiss 3 orang, Brazil 2 orang, Kanada 2 orang, Jepang 2 orang, Afrika Selatan 2 orang, Korea Selatan 2 orang, Ekuador 1 orang, Yunani 1 orang, Polandia 1 orang, Italia 1 orang, Portugal 1 orang, Taiwan 1 orang.<sup>27</sup> Selain itu, ledakan juga merusak puluhan bangunan yang enam diantaranya ambruk total, menghancurkan 20 mobil, 6 sepeda motor, barang-barang dan fasilitas umum yang lain.

#### **b. Kasus Peledakan Bom JW Marriot, 5 Agustus 2003**

Setelah peristiwa Bom Bali, telah terjadi kembali peledakan bom yang mengancam kepentingan asing di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 2003, sekitar pukul 12.40 WIB, terjadi ledakan bom di halaman depan Hotel JW Marriot, Jl.

<sup>26</sup> [www.nusantara.com/\[nusantara\]bom\\_di\\_legian\\_berbobot\\_100kg.htm](http://www.nusantara.com/[nusantara]bom_di_legian_berbobot_100kg.htm)

<sup>27</sup> [www.wikipedia.org/wiki/bom\\_bali](http://www.wikipedia.org/wiki/bom_bali)

Casablanca, Jakarta Selatan. Akibat serangan teroris ini jumlah korban sebanyak 156 orang (meninggal 9 orang, luka-luka 147 orang) dan 22 kendaraan roda empat rusak / terbakar serta beberapa bagian gedung hotel dan perkantoran mengalami kerusakan parah.<sup>28</sup>

**c. Kasus Peledakan Bom Kuningan, 9 September 2004**

Pada tanggal 9 September 2004, sekitar pukul 10.30 pagi, terjadi lagi bom yang mengancam kepentingan Australia di Jakarta, tepatnya didepan Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan. Pada peristiwa Bom Kuningan ini tidak jatuh korban pada pihak Australia, namun beberapa warga Indonesia menjadi korban tewas (9 orang) dan ratusan luka-luka (182 orang) serta kaca-kaca gedung pecah dan efek ledakannya mencapai radius 500 meter. Bom Kuningan menjadi bom nomor dua terbesar di Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, dan dari hasil penelitian bom tersebut dapat diklasifikasikan dalam kategori *high explosive*.

**d. Kasus Peledakan Bom Bali II, 1 Oktober 2005**

Pada 1 Oktober 2005 kembali terjadi pengeboman, tepatnya tiga pengeboman sekaligus, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Tempat-tempat yang dibom antara lain: Kafé Nyoman, Kafé Menega, dan Restoran RAJA's di Kuta Square.

Menurut Kepala Desk Antiteror Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Inspektur Jenderal (Purn.) Ansyad Mbai, bukti awal menandakan bahwa serangan ini dilakukan oleh paling tidak tiga pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel dan badan yang hancur berlebihan dianggap sebagai bukti pengeboman bunuh diri.

---

<sup>28</sup> [www.indonesia\\_NL.com/press\\_release\\_peledakan\\_bom\\_di\\_hotel\\_marriot\\_jakarta.htm](http://www.indonesia_NL.com/press_release_peledakan_bom_di_hotel_marriot_jakarta.htm)

Namun ada juga kemungkinan ransel-ransel tersebut disembunyikan didalam restoran sebelum diledakkan.

Komisioner Polisi Federal Australia Mick Keelty mengatakan bahwa bom yang digunakan tampaknya berbeda dari ledakan sebelumnya yang terlihat kebanyakan korban meninggal dan terluka diakibatkan oleh *shrapnel* (serpihan tajam), dan bukan ledakan kimia. Pejabat medis menunjukkan hasil sinar-x bahwa ada benda asing yang digambarkan sebagai "pellet" di dalam badan korban dan seorang korban melaporkan bahwa bola bearing masuk ke belakang tubuhnya.

Peristiwa pemboman kali ini menyebabkan 23 korban tewas terdiri dari 15 warga Indonesia, 1 warga Jepang, 4 warga Australia, dan tiga lainnya yang diperkirakan adalah para pelaku pengeboman.<sup>29</sup>

**e. Kasus Peledakan Bom JW Marriot dan Ritz Carlton, 17 Juli 2009**

Peledakan bom kali ini adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia pada pukul 07.47 WIB dan 07.57 WIB hari Jumat, 17 Juli 2009. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing.

Selain dua bom rakitan berdaya ledak rendah yang meledak tersebut, sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar 1808 Hotel JW Marriott yang ditempati sejak dua hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman.

Peristiwa ini terjadi sembilan hari sesudah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta dua hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan

---

<sup>29</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2005](http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005)



tim *Indonesian All Star* pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim *Indonesian All Star* yang sedang menginap di Hotel JW Marriot selamat dari bom.

Korban tewas yang dipastikan oleh Polri dan lembaga pemerintah lainnya berjumlah 9 orang, termasuk dua pelaku bom bunuh diri. Korban tewas terdiri dari 3 orang warga Indonesia (termasuk kedua orang pelaku bom bunuh diri), 1 orang warga negara Selandia Baru, 3 orang warga negara Australia, dan 2 orang warga negara Belanda.<sup>30</sup>

#### **f. Kasus Ancaman Serangan Terorisme Di Dalam Negeri Australia**

Ancaman serangan teroris tidak hanya terjadi di luar Australia, bahkan di dalam Australia sendiri upaya-upaya ancaman serangan juga terjadi. Pada tahun 2000, seorang warga negara Australia, Jack Roche, ditugaskan oleh Khalid Sheikh Mohammed, seorang operatif senior Al-Qaeda, untuk mengumpulkan data identifikasi target-target Israel dan Yahudi di Australia. Pada tahun 2001, Khalid Sheikh Mohammed mengajukan visa dan disetujui untuk mengunjungi Australia namun dibatalkan sebelum ia berhasil pergi.

Pada tahun 2005, sembilan orang ditangkap dan dituntut dengan tuduhan serangan terorisme di Sidney, Australia. Pada tahun 2006, seorang warga negara Australia, Fahem Lodhi, didakwa atas rencana serangan teroris di tahun 2003. Lodhi bekerjasama dengan seorang warga negara Perancis, Willie Brigitte, yang dikirim ke Australia oleh anggota senior Lashkar e-Tayyiba.

Dari semua peristiwa terorisme, tragedi 12 Oktober 2002 atau peristiwa Bom Bali I, merupakan titik awal bagi Australia dalam memerangi ancaman terorisme. Setelah memperhatikan dan merasakan langsung beberapa peristiwa yang memilukan

<sup>30</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Jakarta\\_2009](http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Jakarta_2009)

bagi Australia, pemerintah Australia semakin bertekad dalam menjaga keamanan serta kepentingan negara dan warganya, di dalam dan di luar Australia.

Tragedi yang memilukan itu menyadarkan banyak negara, termasuk Australia, bahwa semua etika konflik baik di wilayah domestik maupun antar negara — yang mengharuskan tidak adanya serangan terhadap masyarakat sipil tak berdosa, ataupun sasaran-sasaran non-militer — tidak berlaku bagi aksi terorisme.

Aksi terorisme ini tidak mengenal prinsip-prinsip diskriminatif target, sulit diprediksikan, bahkan menggunakan peralatan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai peralatan perang. Maka, semua aturan main dalam perang yang berlaku secara internasional, tidak dapat menjawab kebutuhan ketika berhadapan dengan para pelaku terorisme.

## **2. Pelaku Terorisme Yang Mengancam Kepentingan Nasional Australia Di Kawasan Asia Tenggara**

Di dalam Buku Putih Australia tentang kontra terorisme tahun 2010, para pelaku terorisme yang mengancam kepentingan nasional Australia di kawasan Asia Tenggara adalah:

### **a. Gerakan Jihad Global Oleh Organisasi Al-Qaeda - Jaringan Terorisme Al-Qaeda Di Asia Tenggara<sup>31</sup>**

Sumber utama terorisme internasional dan ancaman teroris utama ke Australia dan kepentingan Australia saat ini datang dari orang-orang yang mengikuti interpretasi menyimpang dan militan Islam yang menyerukan kekerasan sebagai jawaban terhadap masalah yang ada. Gerakan yang luas dari al-Qaeda, kelompok sekutunya atau yang berhubungan dengannya, dan lain-lain terinspirasi oleh pandangan yang sama mengenai permasalahan di dunia meski tidak terkait langsung

---

<sup>31</sup> Congressional Research Service (CRS), *Terrorism in Southeast Asia*, 2009

dengan jaringan al-Qaeda. Konstituen mereka, meski kecil dalam hal global, tetap bertahan bahkan jika pemimpin senior al-Qaeda saat ini telah dibunuh atau ditangkap.<sup>32</sup>

Pandangan Al-Qaeda yang pertama adalah bahwa pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang muslim dengan mengeksploitasi dan merepresi secara sistematis. Kedua, sebagian besar pemerintahan muslim adalah tidak legitimasi, korup dan cenderung tidak Islami. Ketiga, menyingkirkan pengaruh atau campur tangan Barat terhadap negara-negara mayoritas muslim dengan menciptakan sistem pemerintahan Islam. Keempat, tugas religius setiap muslim sebagai individu untuk menggunakan kekerasan dalam menyerang secara politik, militer, religius dan kultural musuh-musuh Islam di seluruh dunia.<sup>33</sup>

Al-Qaeda telah menjadi pelopor gerakan kelompok-kelompok internasional yang memiliki pemikiran sama dan mempengaruhi cara-cara bekerjanya baik melalui propaganda maupun tindakannya. Ideologi ekstremisnya, tujuan dan interpretasi kejadian didunia dewasa ini memungkinkan kelompok lokal untuk bekerja dalam visi global. Pesan ini bergema kepada teroris jihad di seluruh dunia dan terus menarik pengikut baru. Kegiatan mereka menentang pemerintah dan komunitas global, serta mengancam kesejahteraan dan keamanan di berbagai belahan dunia.

Al-Qaeda tetap menjadi ancaman yang signifikan, namun bukan satu-satunya ancaman. Organisasi ini memiliki jaringan ke kelompok-kelompok ekstremis lain yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Beberapa telah masuk ke dalam asosiasi formal dengan inti al-Qaeda dan diadopsi nama yang mencerminkannya.

---

<sup>32</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia|Protecting..., hal. 8

<sup>33</sup> Ibid..., hal. 8

Dimulai pada awal-pertengahan 1990-an jaringan teroris Al Qaeda membuat terobosan signifikan ke kawasan Asia Tenggara. operator Al-Qaeda Asia Tenggara, yang berasal dari Timur Tengah - tampaknya telah melakukan tiga tugas utama.<sup>34</sup>

Pertama, mereka mendirikan jaringan lokal, dipimpin oleh anggota Al Qaeda Arab, yang berfungsi sebagai kantor regional guna mendukung operasi jaringan global. Jaringan-jaringan ini telah mengeksploitasi wilayah perbatasan yang longgar untuk mengadakan pertemuan di Asia Tenggara dalam merencanakan serangan terhadap sasaran Barat, transit melalui operator tuan rumah di Asia Tenggara, dan menyediakan tempat yang aman bagi operator lain melarikan diri dari badan intelijen AS.

Kedua, dari waktu ke waktu, operator Al-Qaeda Asia Tenggara membantu menciptakan yang mungkin menjadi jaringan teroris regional Asia Tenggara pertama, Jemaah Islamiyah, yang telah merencanakan serangan terhadap sasaran Barat. Meskipun tampaknya JI bukan bawahan Al-Qaeda, kedua jaringan telah bekerja sama secara ekstensif.

Ketiga, jaringan-jaringan lokal Al Qaeda melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok Islam radikal lokal dengan memberikan mereka dana dan pelatihan. Hingga di pertengahan 1990-an, jaringan Al Qaeda Manila memberikan bantuan keuangan yang luas untuk militan Moro seperti Abu Sayyaf dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Ribuan militan dilaporkan telah dilatih di kamp-kamp Al Qaeda di Afghanistan atau di kamp-kamp Filipina, Indonesia, dan Malaysia yang membuka pintu mereka untuk Al Qaeda. Al Qaeda dilaporkan menyediakan dana dan pelatih untuk kamp yang dioperasikan oleh kelompok-kelompok lokal di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

---

<sup>34</sup> Congressional Research Service (CRS), *Terrorism in Southeast Asia*, 2009

Banyak dari kelompok-kelompok ini mengancam status quo dengan berusaha untuk membuat negara-negara Islam di wilayah mayoritas-Muslim, menggulingkan pemerintahan sekuler yang ada, dan / atau mendirikan negara Islam supra-nasional yang baru meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina selatan , dan selatan Thailand.<sup>35</sup>

Dalam mencapai tujuan tersebut, mereka merencanakan dan melakukan serangan kekerasan terhadap Amerika dan sasaran Barat lainnya serta terhadap target Asia Tenggara. Selain itu, Al-Qaeda memanfaatkan jaringan Asia Tenggara untuk membantu mengatur dan membiayai kegiatan global.

**b. Aliansi Al-Qaeda Atau Yang Terkait Dengannya - Jaringan Terorisme Jemaah Islamiyah<sup>36</sup>**

Munculnya gerakan Islam radikal di Asia Tenggara pada 1990-an dapat ditelusuri dari gabungan beberapa fenomena. Diantaranya adalah reaksi terhadap globalisasi - khususnya yang berkaitan dengan Amerika Serikat dalam pikiran elit regional - frustrasi dengan represi oleh pemerintah sekuler, keinginan untuk membuat pan-Islam Asia Tenggara, reaksi terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kedatangan veteran yang berperang bertahun-tahun di Afghanistan.

Salah satu jaringan teroris di Asia Tenggara yang terkait dengan Al-Qaeda adalah Jemaah Islamiyah (JI). Australia memfokuskan perhatiannya terhadap terorisme di Asia Tenggara pada kelompok Islam radikal ini, jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang diketahui atau diduga memiliki hubungan dengan jaringan Al Qaeda. Diketahui bahwa JI pertama kali melibatkan diri sebagai kelompok sel teror

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik bagi operasi Al-Qaeda di Asia Tenggara.<sup>37</sup>

Jaringan kelompok ini terungkap beberapa minggu setelah serangan teroris 11 September 2001, yaitu jaringan teroris pan-Asia dengan jaringan yang luas dan terkait dengan Al Qaeda. Jaringan yang dikenal sebagai Jemaah Islamiyah, ditemukan memiliki jaringan-jaringan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand serta di Australia dan Pakistan.

Jemaah Islamiyah menjadi kelompok teroris yang paling terkemuka di Asia Tenggara sejak akhir 1990-an. Akarnya terletak pada gerakan Darul Islam di Indonesia, yang dibentuk pada tahun 1940-an, yang berusaha untuk menciptakan Negara Islam di Indonesia. Keterlibatan anggota pendiri JI dalam konflik Afghanistan-Soviet dan hubungan pribadi yang mereka bentuk pada waktu itu mengasah keyakinan mereka yang menjadikan mereka bagian dari gerakan perjuangan internasional. Jemaah Islamiyah, atau cabang-cabangnya, bertanggung jawab atas sebagian besar serangan utama anti-Barat yang mempengaruhi Australia.<sup>38</sup>

Tujuan Jemaah Islamiyah antara lain mendirikan rezim Islam di Indonesia, mendirikan sebuah kekhalifahan Islam di wilayah regional Muslim Asia Tenggara dan utara Australia, untuk melancarkan jihad melawan Barat.

Jemaah Islamiyah dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Australia di kawasan Asia Tenggara dan bertanggung jawab atas beberapa peristiwa serangan bom yang menewaskan warga negara Australia pada rentang waktu tahun 2002-2009, yaitu:

- Kasus Peledakan Bom Bali I, 12 Oktober 2002
- Kasus Peledakan Bom JW Marriot, 5 Agustus 2003

<sup>37</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah\\_Islamiyah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Islamiyah)

<sup>38</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia|Protecting..., hal. 12

- Kasus Peledakan Bom Kedutaan Besar Australia, 9 September 2004
- Kasus Peledakan Bom Bali II, 1 Oktober 2005
- Kasus Peledakan Bom JW Marriot dan Ritz Carlton, 17 Juli 2009

**c. Ancaman terorisme dari orang yang lahir atau dibesarkan di Australia, yang telah dipengaruhi oleh pesan-pesan melakukan kekerasan jihad.<sup>39</sup>**

Sejumlah warga Australia diketahui terpengaruh dengan pesan-pesan jihad kekerasan. Banyak dari orang-orang ini lahir di Australia dan mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis. Mereka yang berkomitmen untuk ekstremisme kekerasan di Australia tidak statis, dari waktu ke waktu beberapa dari mereka menjauhi ekstrimisme sementara yang lain menjadi ekstrim.

### **3. Faktor Penyebab Terorisme**

Australia sebagai aktor rasional mengidentifikasi permasalahan fenomena terorisme baik yang terjadi di dalam maupun di luar Australia. Para peneliti menyatakan, tidak ada satu faktor tunggal penyebab terorisme. Terdapat empat pendekatan dalam menganalisa terorisme antara lain: (1) pendekatan multi-kausal, (2) pendekatan politik atau struktural, (3) pendekatan rasional atau organisasional dan (4) pendekatan psikologis.<sup>40</sup>

Dalam pendekatan multi-kausal, Paul Wilkinson (1977) menyatakan bahwa kekerasan politik termasuk konflik etnis, agama dan ideologi sebagai penyebab terorisme. Dari empat kategori, pendekatan multi-kausal memberikan pandangan paling mendekati ke akar penyebab terorisme, berpendapat bahwa terorisme adalah hasil dari kombinasi faktor.

Dalam pendekatan politik dan struktural, mengatakan bahwa penyebab terorisme dapat ditemukan dalam faktor lingkungan. Ross (1996) dan Ted Robert

<sup>39</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia|Protecting..., hal. ii

<sup>40</sup> www.transnationalterrorism.eu, "Exploring Root and...", hal.13



Gurr (1970, 2006) menyatakan bahwa kemiskinan, penindasan dan ketidaksetaraan sebagai penyebab terorisme. Pusat penelitian Gurr's adalah gagasan tentang deprivasi relatif, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perasaan perampasan ekonomi, politik, atau sosial yang relatif daripada absolut. Gurr menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan memicu perasaan frustrasi yang pada akhirnya memfasilitasi munculnya kekerasan kolektif.

Dalam pendekatan rasional atau organisasional, dengan fokus pada terorisme sebagai pilihan strategis rasional, pendekatan ini bertumpu pada gagasan bahwa organisasi secara sadar membuat keputusan untuk menggunakan instrumen terorisme sebagai pilihan terbaik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Martha Crenshaw, berpendapat bahwa terorisme bukanlah produk dari keputusan individu atau perkembangan pribadi, melainkan hasil dari suatu proses kelompok dan kolektif, keputusan yang rasional. Menurut Hudson, pendekatan organisasi mungkin lebih relevan untuk kelompok dengan struktur yang lebih tradisional dengan rantai yang jelas tentang perintah dibandingkan jaringan teroris yang tidak ketat.

Dalam pendekatan psikologis, memperhitungkan motivasi individu untuk terorisme. Pendekatan ini berfokus terutama pada fitur dan karakteristik dari pelaku individu atau kelompok teroris; memeriksa perilaku, metode perekrutan, profil individu, dan 'karir' dari teroris.

Situasi serangan dan ancaman serangan terorisme yang dihadapi Australia saat ini berasal dari munculnya kelompok yang berafiliasi dengan, atau diilhami oleh, pesan dan metode al-Qaeda, di wilayah Asia Tenggara. Dan sejak tahun 2004 terjadi peningkatan ancaman teroris dari orang yang lahir atau dibesarkan di Australia, yang telah dipengaruhi oleh pesan-pesan melakukan kekerasan jihad.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia|Protecting..., hal. ii

Al-Qaeda sebagai suatu organisasi memiliki beberapa pandangan, yang akhirnya mengilhami organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok lainnya di Asia Tenggara.

Pandangan Al-Qaeda yang pertama adalah bahwa pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang muslim dengan mengeksploitasi dan merepresi secara sistematis. Kedua, sebagian besar pemerintahan muslim adalah tidak legitimasi, korup dan cenderung tidak Islami. Ketiga, menyingkirkan pengaruh atau campur tangan Barat terhadap negara-negara mayoritas muslim dengan menciptakan sistem pemerintahan Islam. Keempat, tugas religius setiap muslim sebagai individu untuk menggunakan kekerasan dalam menyerang secara politik, militer, religius dan kultural musuh-musuh Islam di seluruh dunia.<sup>42</sup>

Dari uraian situasi fenomena terorisme yang dihadapi Australia diatas, dapat dilihat faktor penyebab terorisme yang mengancam Australia dan kepentingan Australia di kawasan Asia Tenggara antara lain:

**a. Faktor Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi, Globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*).**

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memicu terorisme.<sup>43</sup> Terorisme umumnya terkait dengan negara-negara dengan pembangunan ekonomi tingkat menengah, sering muncul dalam masyarakat dengan modernisasi yang cepat dan transisi.<sup>44</sup>

Usaha berbagai pihak untuk memahami akar penyebab (*root causes*) dari terorisme umumnya menyimpulkan bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) dan kesenjangan (*inequality*) merupakan persoalan paling mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memerangi terorisme. Lebih

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 8

<sup>43</sup> <http://jakarta45.wordpress.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terorism/>

<sup>44</sup> Borum, Randy, *Psychology of Terrorism*, 2003

jauh, fenomena globalisasi juga disebut sebagai faktor pemicu terorisme. Alasannya adalah karena globalisasi diyakini ikut menjadi faktor signifikan dalam terjadinya kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan global.<sup>45</sup>

Mitra keberhasilan integrasi di dalam ekonomi global adalah pertumbuhan golongan 'globalisers lemah' yang kurang kompetitif, mereka yang pendapatan penduduknya menurun atau stagnan, dan akibatnya adalah meningkatnya pengangguran, ketegangan politik, dan fundamentalisme agama. Tumbuhnya ketimpangan sosial tersebut mengakibatkan pembenaran tindakan teroris oleh para pelaku dalam nama distribusi yang lebih adil untuk kesejahteraan.<sup>46</sup>

Proses globalisasi juga sangat meningkatkan insentif dan peluang bagi terorisme dan membuatnya lebih mudah untuk mengatur, membiayai, dan mempertahankan strategi terorisme.

#### **b. Faktor Ideologi Ekstrimis Bersifat Sekular Atau Agama**

Faktor ideologi ekstrimis (garis keras) bersifat sekular atau agama menjadi penyebab terorisme tingkat menengah, meskipun biasanya orang mengadopsi ideologi ekstrimis sebagai konsekuensi yang didasari politik atau alasan pribadi.<sup>47</sup> Ketika pandangan dunia ini diadopsi dan diterapkan dalam rangka untuk menginterpretasikan situasi dan petunjuk suatu tindakan, mereka cenderung mengambil dinamika mereka sendiri, dan dapat berfungsi untuk merendahkan musuh dan membenarkan kekejaman.<sup>48</sup>

Teroris bukan aktor yang tidak waras atau tidak rasional. Gejala psikopatologi tidak umum di kalangan teroris. Begitu pula dengan teroris bunuh diri, sebagai individu, teroris memiliki faktor risiko khas bunuh diri. Tidak ada profil kepribadian

<sup>45</sup> Philips J. Vermonte, *Menyoal Globalisasi dan Terorisme*, 2003

<sup>46</sup> The Club Madrid Series on Democracy and Terrorism, *Addressing the Causes of Terrorism*, 2005 hal. 22

<sup>47</sup> www.transnationalterrorism.eu, "Exploring Root and...", 2008, hal.17

<sup>48</sup> Ibid..., hal.17

umum yang mencirikan kebanyakan teroris, yang tampaknya sebagai individu yang relatif normal. Teroris dapat mengikuti rasionalitas mereka sendiri berdasarkan logika ideologi ekstremis atau teroris tertentu, tetapi mereka tidak irasional.<sup>49</sup>

Mereka yang terganggu oleh modernisasi yang cepat, sangat rentan terhadap ideologi ekstremis. Ketika norma-norma tradisional, pola sosial dan identitas terancam, orang akan beralih ke ideologi radikal baru berdasarkan agama atau nostalgia kejayaan masa lalu, mitos atau masa depan yang dijanjikan.<sup>50</sup>

### c. Faktor Radikalisme Agama

Faktor ini menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.<sup>51</sup> Bahwa penyebab terorisme berlatar belakang agama itu bukan saja akibat ketidak-adilan dan kemiskinan, akan tetapi juga akibat ideologi.<sup>52</sup>

Ideologi agama, tujuan, dan motivasi berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Keputusan kelompok untuk mengambil jalan kekerasan biasanya situasional dan jarang terkait dengan tradisi keagamaan dari suatu kelompok. Biasanya masalah politik dan ekonomi adalah penyebab utama, dan agama menjadi sarana untuk melegitimasi dan memobilisasi. Terorisme agama tidak selalu, namun berkaitan dengan pemberontakan melawan sekularisasi negara dan masyarakat, serta modernitas dan globalisasi. Dalam kasus Al Qaeda dan kelompok Islam lainnya yang terlibat dalam terorisme, 'keunggulan faktor agama' adalah 'tak terbantahkan'.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Borum, Randy, *Psychology of Terrorism*, 2003

<sup>50</sup> The Club Madrid Series on Democracy and Terrorism, *Addressing the Causes...*, hal. 21

<sup>51</sup> <http://jakarta45.wordpress.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terorism/>

<sup>52</sup> <http://osdir.com/ml/org.region.indonesia.mahawarman/2004-11/msg00029.html>

<sup>53</sup> The Club Madrid Series on Democracy and Terrorism, *Addressing the Causes...*, hal. 28

#### **4. Strategi Australia Menghadapi Serangan Dan Ancaman Serangan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara**

Dalam konteks terorisme, tujuan nasional Australia yang hendak dicapai adalah keamanan nasional Australia yaitu untuk melindungi Australia, warga negara Australia dan kepentingan Australia bebas dari serangan dan ancaman serangan terorisme.<sup>54</sup>

Menurut Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2009, keamanan nasional Australia yaitu berkaitan dengan menjamin Australia bebas dari serangan atau ancaman serangan, menjaga integritas teritorial Australia dan mempromosikan kedaulatan politik Australia, mempertahankan kemerdekaan Australia, dan mempertahankan kemampuan dasar Australia untuk memajukan kesejahteraan ekonomi untuk semua warga Australia. Pertahanan merupakan salah satu unsur dalam pendekatan yang lebih luas untuk keamanan nasional, kemampuan dasar Australia untuk bertindak di dunia dengan menyediakan pilihan ketika pemerintah mempertimbangkan penggunaan kekuatan.<sup>55</sup>

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional Australia, Australia menetapkan strategi dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia serta untung-ruginya untuk kemudian memilih alternatif yang ada dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal (sebagai pilihan yang rasional).

Strategi yang diambil oleh Australia dalam mengatasi permasalahan fenomena terorisme di kawasan Asia Tenggara antara lain:

1. Pembangunan ekonomi luar negeri pemerintah Australia untuk negara berkembang

<sup>54</sup> Counter-Terrorism White Paper 2010: Securing Australia[Protecting..., hal. ii

<sup>55</sup> [http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/defence\\_white\\_paper\\_2009.pdf](http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/defence_white_paper_2009.pdf)

2. Pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di dalam dan di luar Australia
3. Pembangunan masyarakat Australia untuk menolak pengembangan segala bentuk ekstremisme kekerasan dan terorisme di Australia

Dari strategi-strategi tersebut kemudian Australia menetapkan aksi politik luar negeri, antara lain:

- Langkah Strategi Dalam Negeri Australia
  1. Membuat hukum dan perundang-undangan anti terorisme Australia
  2. Pendirian National Counter Terrorism Arrangements
  3. Pembentukan National Counter Terrorism Committee
  4. Pendirian National Counter Terrorism Plan
  5. Meningkatkan Kemampuan Intelijen Australia
  6. Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Imigrasi Australia
  7. Publikasi Daftar Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Australia
  8. Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Australia
  9. Menciptakan Ketahanan Masyarakat Australia
- Langkah Strategi Luar Negeri Australia
  1. Program kerjasama bilateral bantuan pembangunan luar negeri pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia
  2. Kerjasama bilateral kontra terorisme Australia dengan Indonesia
  3. Kerjasama Bilateral Australia Dengan Pemerintah Filipina
  4. Kerjasama Multilateral Australia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Di Dalam South East Asia Counter Terrorism

## **A. Langkah Strategi Dalam Negeri Australia**

### **1. Strategi Pembangunan Sistem Kontra Terorisme Di Dalam Australia**

#### **a. Hukum Dan Perundang-Undangan Anti Terorisme Australia**

Ada dua macam pelanggaran 'terorisme' di bawah undang-undang Australia: kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan undang-undang 'teroris', dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan 'organisasi-organisasi teroris'.<sup>56</sup>

#### **Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Terorisme**

Untuk suatu aksi dikategorikan sebagai suatu 'aksi teroris' di bawah undang-undang Australia, harus diperlihatkan bahwa pelakunya mempunyai maksud untuk memaksa atau mempengaruhi masyarakat umum atau pemerintah dengan intimidasi (gertakan). Juga harus ada maksud untuk meyebarluaskan suatu alasan politik, agama atau ideologi. Dan orang itu juga harus melakukan, atau mengancam akan melakukan, salah satu di bawah ini:

- mengakibatkan cedera fisik yang parah atau kematian pada seseorang;
- mengakibatkan kerusakan berat pada harta milik;
- membahayakan hidup orang lain;
- menciptakan risiko kesehatan atau keamanan; atau
- secara serius mencampuri, mengganggu, atau merusak prasarana, seperti sistem telepon atau jaringan listrik.

Merencanakan atau mengancam untuk melakukan apa saja dari aksi-aksi tersebut di atas juga merupakan pelanggaran. Jaksa tidak perlu mengidentifikasi aksi terorisme tertentu; apa yang mereka harus lakukan ialah memperlihatkan adanya ancaman atau rencana untuk meledakkan bom, tanpa peduli apakah mereka belum memutuskan di mana atau kapan mereka berniat untuk meledakkan bom tersebut.

---

<sup>56</sup> Anti\_Terror\_Laws\_3rd\_Ed\_Bahasa\_2up



Undang-undang menganggap suatu pelanggaran untuk melakukan apa saja dalam persiapan, atau yang menuju ke aksi teroris, atau bahkan hanya memiliki 'apa-apa' yang berhubungan dengan mempersiapkan suatu aksi teroris. Sebagai tambahan, tidak peduli apakah aksi teroris benar-benar terjadi atau tidak. Hukuman-hukuman yang dikenakan sebagai berikut:

*Tabel 2.2 Tabel Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Terorisme*

| Jenis Pelanggaran  | Hukuman Maksimal     |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Menyadari            | Ceroboh              |
| Ikut serta dalam suatu aksi teroris  | Penjara seumur hidup | Penjara seumur hidup |
| Tindakan-tindakan lain dalam persiapan, atau perencanaan aksi-aksi teroris   | Penjara seumur hidup | Penjara seumur hidup |
| Mendanai suatu aksi teroris, baik aksi tersebut terjadi atau tidak terjadi, dengan uang, senjata atau peralatan    | Penjara seumur hidup | Penjara seumur hidup |
| Memberikan atau menerima pelatihan berkenaan dengan persiapan, ikut serta, atau membantu aksi-aksi teroris         | 25 tahun             | 15 tahun             |
| Memiliki benda-benda yang berkenaan dengan persiapan, ikut serta, atau membantu aksi-aksi teroris                  | 15 tahun             | 10 tahun             |
| Mengumpulkan atau menyusun dokumen yang berkaitan dengan persiapan, tindakan, atau bantuan dalam aksi-aksi teroris | 15 tahun             | 10 tahun             |

Sumber: Undang-undang Anti Terorisme: ASIO, Polisi dan Anda<sup>57</sup>

### **Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Organisasi-Organisasi Teroris**

Terdapat dua tipe utama 'organisasi teroris' menurut undang-undang Australia. Tipe pertama, organisasi teroris ialah organisasi apa saja yang langsung

<sup>57</sup> Anti\_Terror\_Laws\_3rd\_Ed\_Bahasa\_2up.pdf

atau tidak langsung terlibat dalam mempersiapkan, merencanakan, membantu atau membina pelaksanaan suatu aksi teroris, tidak peduli apakah aksi 'teroris' benar-benar terjadi. Hal ini berarti bahwa bahkan jika sebuah organisasi tidak terdapat dalam daftar yang terlarang (lihat tipe kedua organisasi teroris di bawah ini), tetaplah dianggap sebagai pelanggaran untuk terlibat dengan organisasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, kenyataan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi teroris akan harus dibuktikan dalam pengadilan.

Tipe kedua ialah 'organisasi terlarang', yang berarti organisasi tersebut khusus dilarang di Australia. Pemerintah dapat menjatuhkan larangan pada suatu organisasi jika yakin bahwa organisasi tersebut secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mempersiapkan, merencanakan, membantu atau membina tindakan aksi teroris.

Pemerintah juga dapat menjatuhkan larangan suatu organisasi jika organisasi tersebut 'membela' tindakan suatu aksi teroris, artinya jika organisasi tersebut secara langsung atau tidak langsung memberikan konseling atau mendorong, atau memberikan instruksi pada tindakan suatu aksi teroris, atau jika organisasi tersebut secara langsung memuji tindakan aksi teroris dimana pujian tersebut berisiko akan mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan teroris. Pelanggaran-pelanggaran organisasi sebagai berikut:

*Tabel 2.3 Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Organisasi-Organisasi Teroris*

| Jenis Pelanggaran   | Hukuman Maksimal |          |
|---|------------------|----------|
|   | Menyadari        | Ceroboh  |
| Memberikan pengarahan untuk aksi-aksi organisasi teroris  | 25 tahun         | 15 tahun |
| Merekrut suatu organisasi teroris. Termasuk di dalamnya membujuk, menghasut atau mendorong orang lain untuk ikut serta atau berpartisipasi. | 25 tahun         | 15 tahun |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Menyelenggarakan pelatihan organisasi teroris atau menerima pelatihan dari suatu organisasi teroris  | 25 tahun | 25 tahun |
| Secara langsung atau tidak langsung mendapatkan dana untuk atau dari suatu organisasi teroris  | 25 tahun | 15 tahun |
| Memberikan dukungan atau sumber-sumber kepada organisasi teroris untuk membantu mereka ikut serta dalam aksi terorisme   | 25 tahun | 15 tahun |
| Keanggotaan suatu organisasi teroris baik secara resmi maupun tidak resmi  | 10 tahun | -        |
| Berasosiasi dengan pengarah, promotor, atau anggota dari organisasi teroris terlarang di mana asosiasi tersebut memberikan dukungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi tersebut untuk keberadaannya atau melebarkan sayapnya | 3 tahun  | -        |

Sumber: Undang-undang Anti Terorisme: ASIO, Polisi dan Anda<sup>58</sup>

Selain hukum terhadap pelaku teror diperkeras, instrumen-instrumen anti-teroris lainnya seperti kemampuan intelijen, keamanan perbatasan serta kemampuan pertahanan Australia juga ditingkatkan untuk mengisolasi sel-sel kaum teroris, organisasi dan pasokan logistik serta pendanaan dan pemimpin teroris.

#### b. Pendirian National Counter-Terrorism Arrangements (NCTA)<sup>59</sup>

Australia sebagai negara dengan sistem pemerintahan Federal memiliki beberapa Negara Bagian dan Wilayah, dimana setiap Negara Bagian dan Wilayah memiliki otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dengan terjadinya tragedi Bom Bali pada tahun 2002, menyadarkan pemerintah Australia akan pentingnya sebuah

<sup>58</sup> Anti\_Terror\_Laws\_3rd\_Ed\_Bahasa\_2up.pdf

<sup>59</sup> www.nationalsecurity.gov.au

kerjasama dalam menanggulangi masalah terorisme baik yang terjadi di luar negeri maupun kemungkinan ancaman serangan teroris yang terjadi di dalam negeri. Hal ini semakin kuat setelah para pemimpin Negara Bagian dan Federal menyatakan suatu sikap bersama dalam menghadapi masalah terorisme dengan mendirikan *National Counter Terrorism Arrangements*.

**c. Pembentukan National Counter-Terrorism Committee (NCTC)<sup>60</sup>**

Pada 22 Oktober 2002, berhasil ditandatangani kesepakatan bersama antar pemerintah Negara Bagian dan pemerintah Federal Australia yang berisi pembentukan *National Counter Terrorism Committee* (NCTC), yang akan menggantikan *Standing Advisory Committee on Commonwealth / State Cooperation for Protection Against Violence* (SAC-PAV). NCTC ini merupakan bentuk konkrit dari kesadaran akan pentingnya kerjasama penanganan terorisme di dalam negeri.

**d. Pendirian National Counter-Terrorism Plan (NCTP)<sup>61</sup>**

Pembentukan NCTC pada akhirnya menghasilkan suatu pemikiran matang mengenai penanganan masalah terorisme yang mungkin terjadi di dalam negeri, dengan berbagai perencanaan penanggulangannya. Hasil pemikiran tersebut teraktualisasi dengan didirikannya *National Counter Terrorism Plan* dan program ini diluncurkan pada 11 Juni 2003.<sup>62</sup> *National Counter Terrorism Plan* (NCTP) Australia menguraikan tentang tanggung jawab, otoritas dan mekanisme untuk mencegah, atau cara bagaimana mengatur, aksi terorisme dan konsekuensinya di dalam negeri Australia.

---

<sup>60</sup> [www.nationalsecurity.gov.au](http://www.nationalsecurity.gov.au)

<sup>61</sup> [www.nationalsecurity.gov.au](http://www.nationalsecurity.gov.au)

<sup>62</sup> [www.pmc.gov.au/publications/protectingaustralia/strategy](http://www.pmc.gov.au/publications/protectingaustralia/strategy)

**e. Meningkatkan Kemampuan Intelijen Australia**

Jaringan teroris adalah jaringan yang rahasia dan tertutup. Mereka menyembunyikan dan mengaburkan kegiatan mereka untuk menghindari deteksi dan gangguan. Dalam menghadapi terorisme, Pemerintah perlu akses intelijen yang akan mengungkap teroris, metode dan rencana mereka.

**f. Meningkatkan Keamanan Perbatasan dan Imigrasi Australia**

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencegah gerakan individu yang mencoba untuk memasuki atau transit di Australia untuk melakukan tindakan teroris atau kegiatan yang berkaitan dengan terorisme sangat penting untuk keamanan Australia. Setiap tahun beberapa pemohon visa ditolak masuk ke Australia atas dasar penilaian keamanan— kadang karena diduga berkaitan dengan jaringan kegiatan teroris.

**g. Publikasi Daftar Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Australia**

Pemerintah Australia telah secara resmi menetapkan dan mempublikasikan daftar organisasi teroris yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam kepentingannya. Untuk efektivitas penanganan masalah terorisme, bagi Australia sangat penting melengkapi hukumnya untuk menangkap atau menghukum tidak hanya suatu tindakan teroris saja tetapi juga organisasi yang merencanakan, mendanai dan membawanya keluar.

**h. Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Australia**

Pada Mei 2003, Australia merestrukturisasi ulang *Australia Defence Force* dengan membentuk satuan khusus yang baru berupa *Australia Defence Force Domestic Terrorism Response*, yang berfungsi sebagai penanganan kasus serangan terorisme yang mungkin terjadi didalam negeri. Kasus yang mungkin untuk ditangani

seperti mengamankan gedung, membebaskan sandera, menyegel suatu area serta merespon serangan kimia, biologi, radiologi (radiasi), nuklir maupun bom.

Australia juga membentuk Pasukan Komando (*Special Operations Command*) berkekuatan 330 personil dengan pelatihan kemampuan tempur yang tinggi guna mendukung personil Pasukan Khusus (*Special Force*) yang telah ada.

## **2. Strategi Pembangunan Masyarakat Australia Untuk Menolak Pengembangan Segala Bentuk Ekstremisme Kekerasan Dan Terorisme Di Australia**

### **a. Membangun Ketahanan Masyarakat Australia**

Proses radikalisasi juga bekerja di dalam masyarakat Australia, maka strategi pemerintah Australia adalah pembangunan ketahanan masyarakat Australia, yaitu berusaha membangun masyarakat Australia yang kuat dan tangguh untuk menolak pengembangan segala bentuk terorisme ekstremis dan radikal di Australia.

Dan Australia akan melawan terorisme ekstremis dan radikal melalui dua cara, yaitu: (1) membangun sejarah Australia yang menyertakan multikulturalisme dan menghargai keanekaragaman budaya untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang tahan terhadap provokasi sifat membenci dan memecah belah masyarakat yang dapat memicu terorisme; (2) bekerja sama dengan masyarakat Australia melalui pendekatan nasional untuk mengurangi daya tarik ekstremisme kekerasan dan mendukung langkah alternatif bagi mereka yang berisiko, dan bekerjasama dengan komunitas internasional untuk mendukungnya.

## **B. Langkah Strategi Luar Negeri Australia**

Langkah strategi luar negeri Australia di kawasan Asia Tenggara yaitu pembangunan ekonomi luar negeri pemerintah Australia untuk negara berkembang dan pembangunan sistem kontra terorisme pemerintah Australia di luar Australia.

Strategi-strategi ini diambil dalam upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional Australia serta mengatasi masalah serangan dan ancaman serangan terorisme di kawasan Asia Tenggara yaitu terorisme berdasarkan ideologi ekstrimisme dan radikalisme agama yang berkembang, karena Australia sebagai sebuah negara di dunia internasional perlu untuk melakukan kerjasama-kerjasama.

### **1. Strategi Pembangunan Ekonomi Luar Negeri Pemerintah Australia Untuk Negara Berkembang**

#### **a. Kerjasama Bilateral Program Bantuan Pembangunan Luar Negeri Pemerintah Australia Untuk Indonesia<sup>63</sup>**

Program ini merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Program ini adalah program antar Pemerintah (G to G), dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra utama AusAID.

Program ini menggunakan berbagai pendekatan pelaksanaan. AusAID memiliki proyek-proyek bilateral dan juga menyalurkan dana melalui badan-badan

<sup>63</sup> <http://www.indo.ausaid.gov.au/bi/aboutausaid-indo.html>



Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga Keuangan Internasional (IFI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional (INGO). AusAID juga mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan berbagai kelompok masyarakat lain. Semua kegiatan program membutuhkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia.

Mulai 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia akan dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (*Australia Indonesia Partnership* atau AIP): program bantuan Pemerintah Australia secara keseluruhan dengan anggaran pengeluaran sekitar A\$2 milyar untuk jangka waktu lima tahun. Program ini mencakup paket Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) bernilai A\$1 milyar, satu-satunya paket bantuan terbesar dalam sejarah Australia.

#### **Strategi Kerjasama Pembangunan Australia di Indonesia**

Tujuan jangka panjang program kerjasama pembangunan Australia dengan Indonesia adalah untuk membantu tercapainya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, melalui:

- Dukungan untuk memperbaiki manajemen ekonomi dengan membantu langkah-langkah utama reformasi struktural
- Dukungan untuk memperkuat institusi dan pelaksanaan demokrasi dengan membantu reformasi hukum dan keadilan, serta institusi demokrasi
- Meningkatkan keamanan dan stabilitas melalui dukungan untuk counter-terorisme, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan
- Membantu peningkatan akses dan mutu pelayanan publik dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk merespon berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia untuk jangka menengah dan dalam rangka membantu kepentingan nasional Australia, program bantuan pembangunan akan:

- Melanjutkan perluasan bantuan kepada pemerintahan dengan mendukung reformasi ekonomi, hukum dan keadilan; promosi dan proteksi hak-hak azasi; serta bantuan berkelanjutan untuk kegiatan counter-terorisme
- Meningkatkan dampak program-program berfokus kemiskinan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Kemitraan Australia Indonesia mencerminkan kepentingan nasional Australia dalam mendukung stabilitas dan kemakmuran Indonesia dengan membantu Indonesia meningkatkan pemerintahan, dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kemiskinan di Indonesia terpusat di golongan penduduk tanpa pendidikan atau pendidikan formal yang minim. Program besar pendidikan dasar sedang diimplementasikan untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan dengan sumber daya terintegrasi.

Australia melanjutkan dukungan bagi demokrasi di Indonesia melalui perluasan program bantuan reformasi hukum dan hak azasi yang berpusat pada reformasi keadilan; promosi dan proteksi hak azasi dan akuntabilitas publik; proses dan institusi pemilu dan parlemen; serta bantuan bagi organisasi masyarakat hukum dan tindakan anti korupsi.

Program-program pembangunan tetap melanjutkan dukungan bagi langkah-langkah reformasi ekonomi. Termasuk restrukturisasi dan pengawasan sektor keuangan, manajemen hutang, peningkatan pemasukan kas negara, dan peningkatan kapasitas audit. Program yang didasarkan pada bantuan yang telah berjalan untuk pusat

manajemen obligasi Pemerintah, meneruskan bantuan bagi kantor pajak Indonesia dalam mengintegrasikan dan memperbaiki proses-proses, dan membantu proses restrukturisasi besar di Kementerian Keuangan Indonesia.

Pendekatan terintegrasi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia juga telah diterapkan. Termasuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan baru dalam pengentasan kemiskinan, dan pemerintahan tingkat distrik yang lebih baik.

Strategi AIP bertujuan untuk mendukung secara strategis pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia. Sasarannya adalah agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat bermitra dalam upaya mencapai Indonesia yang lebih sejahtera, demokratis dan aman, dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia. Pilar-pilar utama Strategi ini adalah:<sup>64</sup>

#### **Pilar 1 : Pertumbuhan Yang Berkelanjutan Dan Manajemen Ekonomi**

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk menghasilkan:

- Manajemen sumber daya alam dan tanggap terhadap perubahan iklim yang lebih baik.
- Kebijakan ekonomi yang lebih baik dan manajemen ekonomi yang lebih kokoh di tingkat pusat.
- Mengurangi hambatan-hambatan dalam pengembangan prasarana dan produktivitas.

Pilar 1 adalah dasar dari AIP. Pilar ini sangat menekankan pentingnya membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui manajemen sumber daya dan ekonomi yang lebih baik. Bila memungkinkan, program-program ini

<sup>64</sup> <http://www.indo.usaid.gov.au/bi/docs/AIP-countrystrat%2008-13-indo.pdf>

akan dilengkapi dengan kerjasama ilmiah dan teknis antara badan-badan Australia dan Indonesia yang terkait.

### **Program Nasional Untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)**

Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MANDIRI) merupakan program Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan peluang kerja. Program ini berfokus pada serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat dan akan mencakup 75,000 desa, dengan anggaran pemerintah sebesar US\$800 juta per tahun untuk mengurangi tingkat pengangguran perempuan dan laki-laki.

Australia akan mencari cara yang efektif untuk mendukung Indonesia dan memperluas kontribusi AIP kepada PNPM-MANDIRI, mengingat program ini mengusahakan terciptanya peluang kerja, pemerintahan ekonomi yang berpusat pada masyarakat, sumber energi yang dapat diperbaharui (micro-hydro), ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berbasis masyarakat, dan mendorong kesetaraan gender.

### **Pilar 2 : Investasi Untuk Pembangunan Manusia**

Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Mutu, akses dan penanganan pendidikan yang lebih baik.
- Akses dan sistem kesehatan yang lebih baik.

AusAID memberikan bantuan pembangunan di sejumlah sektor perekonomian Indonesia. Sektor-sektor tersebut adalah:

#### **1) Pendidikan dan Beasiswa**

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan adalah hak asasi dasar manusia. Namun masih banyak anak yang kehilangan kesempatan mendapat pendidikan - baik karena mereka tidak mampu

bersekolah, tempat tinggal yang jauh atau karena tekanan untuk bekerja pada usia muda belia.

Australia mendukung komitmen Indonesia untuk menyediakan akses untuk pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Bantuan Australia beragam, dari pendidikan dasar hingga pelatihan ketrampilan kejuruan dan meningkatkan kualifikasi tingkat perguruan tinggi.:

## **2) Kesehatan**

Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk menyediakan kebutuhan kesehatan perempuan dan anak; mengatasi HIV, malaria dan penyakit menular, serta memperkuat sistem kesehatan.

### **Pilar 3: Demokrasi, Keadilan Dan Pemerintahan Yang Baik**

Australia akan bekerjasama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Kapasitas, akuntabilitas dan daya tanggap yang lebih kuat terkait lembaga-lembaga serta proses hukum, demokrasi dan pengawasan.
- Pemerintah daerah dan manajemen keuangan publik yang lebih baik, sesuai dengan permintaan daerah.

Indonesia terus mengkonsolidasikan proses demokrasinya dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahnya. Meskipun kemajuan telah terjadi sejak transisi menuju demokrasi di tahun 1999, kualitas dari lembaga-lembaga demokrasi publik dan akuntabilitasnya masih harus ditingkatkan.

### **Pemerintahan Demokratis**

Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah blok bangunan fundamental bagi pembangunan. Penguatan tata kelola akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mengatasi pengangguran, mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran nasional, dan kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk AusAID.

Australia bekerja dengan perencanaan ekonomi dan lembaga keuangan untuk mendukung tujuan Pemerintah Indonesia terhadap kesinambungan fiskal, sektor keuangan yang kuat dan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan teknis, pengembangan kapasitas dan mengembangkan kemitraan pemerintah-ke-pemerintah (G to G). Program berfokus pada administrasi pajak, pengelolaan hutang, peraturan sektor keuangan dan pengawasan, dan kebijakan perdagangan internasional.

Di sektor reformasi hukum, Australia membantu badan-badan Pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga hukum dan peradilan dan organisasi hak-fokus hukum dan manusia di empat bidang utama: anti-korupsi, akses terhadap keadilan, kejahatan lintas-nasional dan hak asasi manusia.

Australia juga mendukung sektor publik Pemerintah Indonesia agenda reformasi, serta kerja organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendorong pengembangan masyarakat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sipil yang dinamis di Indonesia.

#### **Pilar 4: Keamanan Dan Kedamaian**

Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memberikan:

- Respon yang lebih baik atas kebutuhan kemanusiaan, keadaan darurat dan kerentanan terhadap bencana alam
- Kapasitas yang lebih baik dalam memastikan keselamatan dan keamanan transportasi dan dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara.

Tingkat keamanan dan stabilitas Indonesia berkaitan erat dengan pembangunan ekonominya. Pertumbuhan kedua unsur di atas sempat terganggu akibat dari serangan teroris (seperti Bom Bali), gerakan separatis di Aceh dan ancaman-

ancaman lintas batas yang berasal dari perpindahan manusia. Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai bencana alam berskala besar yang mengancam keselamatan banyak orang.

Melalui Pilar 4, Australia bermaksud membantu Indonesia meningkatkan kemampuannya dalam merespon, mempercepat pemulihan dan serta mengurangi kerentanan Indonesia atas dari situasi-situasi tersebut.

Membantu Indonesia meningkatkan keselamatan transportasi dan memerangi kejahatan lintas negara adalah salah satu bidang yang akan menjadi kunci kerjasama dan kemitraan jangka panjang. Departemen-departemen dan badan-badan khusus Pemerintah Australia akan terus menyediakan bantuan yang praktis dan tepat sasaran guna meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia, menghadapi terorisme, dan membantu lembaga-lembaga perhubungan dan pengawasan perbatasan sehingga mereka bisa menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara dan meningkatkan standar keselamatan.

Setelah Bom Bali di tahun 2002 dan 2005, Polisi Federal Australia mempererat kerjasamanya dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan membantu pembentukan Pusat Koordinasi Kejahatan Lintas Negara dan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta. Kemitraan antara Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia dengan pihak berwenang di Indonesia akan terus meningkatkan kemampuan di bidang-bidang seperti manajemen perbatasan dan sistem peringatan. Program-program yang dijalankan melalui Departemen Pembangunan Infrastruktur, Transport, Regional Australia dan pemerintah provinsi dan kabupaten Indonesia akan mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan dan keamanan transportasi, baik di udara maupun di laut.



Australia juga berkomitmen membentuk kerjasama yang erat dengan Indonesia dalam hal mencari solusi jangka panjang untuk masalah penangkapan ikan ilegal baik di kawasan perairan utara Australia maupun di perairan lain di kawasan Asia. Solusi ini akan dicapai melalui program-program yang dapat membantu pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan masyarakat secara menyeluruh, dan membuka peluang kerja, termasuk dalam lingkungan masyarakat nelayan. Australia juga akan membantu memerangi penyelundupan manusia, sebagai salah satu bentuk usaha menghadapi masalah lintas batas, dengan bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

### **Membangun Kemampuan Kontra Terorisme**

Setelah peristiwa pengeboman Bali I pada tahun 2002, Perdana Menteri Australia mengumumkan US\$ 10 juta, untuk empat tahun membangun kemampuan Inisiatif kontra terorisme dengan tiga prioritas yang luas untuk bantuan: membatasi aliran pembiayaan kepada teroris, meningkatkan keamanan perjalanan dengan memperkuat bandara, imigrasi dan bea cukai kontrol kemampuan, dan membangun kapasitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada kontra-terorisme dan kejahatan transnasional.

Australia telah menyediakan bantuan yang cukup besar bagi Indonesia untuk memperkuat rezim anti pencucian uang selama beberapa tahun. Melalui inisiatif Perdana Menteri, bantuan sedang dikonsolidasikan dan diperpanjang untuk membendung aliran pembiayaan kepada teroris, termasuk dengan mendukung pembentukan dan pengoperasian unit intelijen keuangan Indonesia yang efektif, PPATK.

AusAID mendukung berbagai upaya bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kontra-terorisme dari lembaga kunci Indonesia yang

bertanggung jawab atas pengelolaan pergerakan orang dan barang di seluruh perbatasan Indonesia. *Australian Federal Police (AFP)* telah memulai program untuk membangun keterampilan kontra-terorisme Kepolisian Indonesia. Program ini melibatkan pengiriman sejumlah pelatihan, dukungan kelembagaan untuk pembentukan *Transnasional Crime Centre (TNCC)* dan pengembangan sistem informasi manajemen kasus.

Pencapaian / hasil:

- Dukungan untuk keberhasilan pembentukan PPATK, unit intelijen keuangan Indonesia.
- Lebih dari 100 staf POLRI terlatih dalam analisis intelijen dan teknik pengawasan.
- Pengembangan dan roll-out database nasional pertama POLRI, Manajemen Kasus dan Sistem Informasi.
- Pembentukan TNCC POLRI, yang terletak di Markas Besar Polri di Jakarta.
- Tenaga Bea Cukai terlatih dalam keterampilan pencarian kapal dan analisa intelijen.

## **2. Strategi Pembangunan Sistem Kontra terorisme pemerintah Australia di luar Australia.**

Strategi ini diambil dalam upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional Australia serta mengatasi masalah serangan dan ancaman serangan terorisme di kawasan Asia tenggara yaitu terorisme berdasarkan ideologi ekstrimisme dan radikalisme agama yang berkembang, karena Australia sebagai sebuah negara di dunia internasional perlu untuk melakukan kerjasama-kerjasama.

### **a. Kerjasama Bilateral Kontra Terorisme Australia Dengan Indonesia**

1) Kerjasama Australia Dengan Indonesia Menuntaskan Kasus Bom Bali I<sup>65</sup>

Kerjasama kedua negara, antara Australia dan Indonesia dilakukan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku teror Bom Bali I yang menewaskan 88 orang warga negara Australia. Tim dari *Australia Federal Police* datang ke Bali untuk membantu penyelidikan kasus tersebut. Australia membantu mulai dari penyelidikan jenis bom, tes DNA serta evakuasi korban. Beberapa tersangka telah berhasil ditetapkan antara lain: Patek, Samudra, Imron, Wayan, Dulmatin, Idris, Amrozi dan Hambali.

2) Kerjasama Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Indonesia Membangun *Trans National Crime Center* (TNCC) di Jakarta

Australia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Penanggulangan Kejahatan Trans Nasional (*Trans National Crime Center* atau TNCC) yang bermarkas di Jakarta pada 21 Januari 2004. TNCC ini sekaligus akan menjadi pusat pelatihan kerjasama antiteror yang bisa digunakan sesama negara ASEAN dan juga kesepakatan untuk memperkuat laboratorium forensik supaya bisa digunakan pula bagi negara-negara di kawasan ASEAN dalam penyelidikan dan penanganan masalah terorisme. TNCC ini nantinya akan diperluas menjadi lembaga kerjasama ditingkat Asia Pasifik.

3) Kerjasama Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Indonesia Membangun Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation (JCLEC) di Jakarta Dan Pusat Pelatihan Anti Teror (PLATINA) di Semarang<sup>66</sup>

Australia bekerjasama dengan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Regional Tingkat Menteri tentang Kontra-Terorisme di Bali pada Februari 2004. Hasil dari konferensi tersebut adalah berdirinya Jakarta Center for Law Enforcement

<sup>65</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2002](http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002)

<sup>66</sup> [http://jclec.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=14&Itemid=28](http://jclec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28)

Cooperation (JCLEC) dan Pusat Pelatihan Anti Teror (Platina) yang diresmikan tanggal 3 Juli 2004.

Pada bulan Februari 2008, Perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara Australia dan Indonesia mulai berlaku penuh, menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama bilateral penegakan hukum, khususnya terhadap perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, dan terorisme. Perjanjian itu menandai kelanjutan dari upaya Australia untuk membangun kemampuan polisi Indonesia, seperti Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC), yang memainkan peran penting dalam mendorong kerjasama antar instansi Asia Tenggara yang terlibat dalam kontra-terorisme, dimulainya bersama program pelatihan hukum pada bulan Juli, perpanjangan Nota Kesepahaman Terorisme (MOU), dan konsultasi kontra-terorisme perdana yang diselenggarakan pada bulan Mei 2008.

#### 4) Kerjasama Australia Dengan Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Imigran Ilegal

Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia.

#### **b. Kerjasama Bilateral Australia dengan Pemerintah Filipina**

Australia akan bekerjasama erat dengan memodernisasi kekuatan pertahanan di Filipina, di mana akan terus memiliki kepentingan dalam membantu mengembangkan kemampuan anti-terorisme mereka, dan profesionalisme angkatan bersenjata mereka ketika menghadapi tantangan keamanan internal yang berat.

**c. Kerjasama Multilateral Australia Dengan Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Di Dalam SEACT (*South East Asia Counter Terrorism*)**

Australia melanjutkan keterlibatan multilateral dengan bekerjasama dalam forum-forum internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat kawasan Asia Tenggara, Australia turut bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang tergabung dalam SEACT (*South East Asia Counter Terrorism*). Kerjasama yang dilakukan meliputi pertukaran informasi seputar isu terorisme.